



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

OPTIMISME PEMERINTAH TERHADAP TARGET *LIFTING* MINYAK DAN SWASEMBADA ENERGI NASIONAL

Audry Amaradyaputri Suryawan
Analisis Legislatif Ahli Pertama
audry.suryawan@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah terus menunjukkan optimisme terhadap pencapaian target *lifting* minyak bumi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, yaitu sebesar 605.000 barel per hari (bph), serta target jangka panjang peningkatan *lifting* hingga 900 ribu sampai 1 juta bph pada tahun 2029–2030. Optimisme ini didasari oleh kemajuan teknologi eksplorasi dan produksi, serta penguatan komitmen investasi dari mitra global. Salah satu langkah konkret dalam merealisasikan target tersebut adalah percepatan penambahan produksi dari Blok Cepu yang dikelola oleh ExxonMobil Cepu Limited.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peningkatan produksi sebesar 30.000 bph dari lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Jawa Timur, pada 26 Juni 2025. Dengan penambahan tersebut, produksi dari Blok Cepu diperkirakan mencapai puncaknya sekitar 180.000 bph pada tahun 2025. Jumlah ini menyumbang sekitar 25 persen dari total *lifting* minyak nasional, menjadikan Blok Cepu sebagai salah satu tulang punggung produksi minyak Indonesia. Proyek ini melibatkan investasi sebesar US\$4 miliar dan telah menyumbang hingga US\$35 miliar untuk pendapatan negara. Inisiatif ini dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional.

Optimisme terhadap pencapaian target *lifting* turut diperkuat oleh kondisi cadangan minyak nasional yang masih terjaga, dengan volume mencapai 2,41 miliar barel. Sementara itu, kinerja *lifting* pada tahun 2025 menunjukkan tren yang lebih positif dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), realisasi produksi minyak terus meningkat, dengan capaian 580.405 bph pada Mei 2025 dan meningkat menjadi 583.275 bph pada Juni 2025. Secara kumulatif, *lifting* dari Januari hingga Mei 2025 telah mencapai 93,9 persen dari target APBN.

Kinerja tersebut tidak terlepas dari intensifikasi program hulu minyak dan gas bumi (migas) seperti pengeboran sumur pengembangan, *workover*, serta *well service* yang mengalami peningkatan signifikan. Hingga Mei 2025, pengeboran sumur pengembangan telah mencapai 337 sumur, meningkat 20 persen dibandingkan tahun lalu. Aktivitas *workover* dan *well service* masing-masing juga tumbuh sebesar 7 persen dan 12 persen secara tahunan. Saat ini, fokus utama diarahkan pada percepatan pengeboran sumur pengembangan serta penyelesaian target *onstream* untuk 15 proyek hulu migas, sebagai upaya mempertahankan tingkat produksi secara optimal di tengah tantangan penurunan laju produksi (*decline rate*).

Di samping itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong optimalisasi produksi di seluruh wilayah kerja yang berada di bawah koordinasi SKK Migas. Tiga strategi utama diterapkan untuk mendukung pencapaian target *lifting* minyak. *Pertama*, percepatan kegiatan eksplorasi baik di wilayah kerja baru maupun eksisting, termasuk melalui penawaran

61 wilayah kerja baru kepada pelaku usaha. *Kedua*, pemanfaatan teknologi terbaru seperti *enhanced oil recovery* dan *horizontal fracking* untuk meningkatkan perolehan minyak, khususnya di lapangan-lapangan yang mengalami penurunan produksi. *Ketiga*, penyederhanaan regulasi di sektor hulu migas, termasuk evaluasi pemberian insentif serta integrasi dan penyederhanaan proses perizinan guna mempercepat kegiatan investasi dan produksi.

Sebagai pelengkap strategi peningkatan *lifting* minyak, pemerintah juga tengah merancang pembangunan kilang minyak *portable* berkapasitas hingga 1 juta bph. Proyek ini direncanakan akan dibiayai oleh investor dalam negeri, termasuk melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pembangunan kilang akan dilakukan di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua, dalam rangka mendorong pemerataan infrastruktur energi nasional. Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan terminal penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) dengan kapasitas setara untuk memperkuat cadangan energi nasional. Pembangunan kilang ini dinilai strategis dalam meningkatkan ketahanan energi Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan kerentanan rantai pasok BBM. Keberadaan kilang domestik juga berpotensi menekan inefisiensi akibat ketergantungan pada harga spot impor, serta memungkinkan penyimpanan cadangan BBM dari sebelumnya 12–14 hari menjadi dua hingga tiga bulan.

Atensi DPR

Upaya pencapaian target *lifting* minyak nasional serta rencana jangka panjang menuju swasembada energi memerlukan perhatian serius dari Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral. Dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI perlu memantau pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi minyak nasional, termasuk kegiatan pengeboran sumur pengembangan, penyelesaian proyek *onstream* hulu migas, serta pengawasan terhadap realisasi proyek strategis, seperti pembangunan kilang *portable* dan terminal penyimpanan BBM. Komisi XII DPR RI juga perlu mengevaluasi efektivitas program kerja Kementerian ESDM dan SKK Migas dalam menjaga keberlanjutan produksi serta pengelolaan cadangan energi nasional. Dalam rangka fungsi anggaran, Komisi XII DPR RI perlu mencermati alokasi dan efektivitas belanja negara untuk sektor hulu migas, serta memastikan bahwa dukungan fiskal terhadap proyek infrastruktur energi, teknologi migas, dan insentif eksplorasi dijalankan secara akuntabel dan tepat sasaran guna mendukung tercapainya swasembada energi.

Sumber

antaranews.com, 26 Juni 2025;

bisnis.com, 24, 26, dan 27 Juni 2025;

cnnindonesia.com, 26 Juni 2025;

esdm.go.id, 27 Juni 2025; dan

kontan.co.id, 24, 25, dan 26 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*